

## Artikulasi Kekuasaan Dalam Masyarakat Nelayan: Studi Kasus Klientelisme di Pesisir Kota Makassar

Penulis:

Rizari<sup>1</sup>, Sudarmono<sup>1</sup>, Hari<sup>2</sup>

Afiliasi:

<sup>1</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 20 Jatinangor 456363, Indonesia

<sup>2</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, Jl. A. Yani No.2 Kota Makassar 90111, Indonesia

e-Mail:

[rizari@ipdn.ac.id](mailto:rizari@ipdn.ac.id), [sudarmono@ipdn.ac.id](mailto:sudarmono@ipdn.ac.id), [hari@gmail.com](mailto:hari@gmail.com)

**\*Corresponding author**

Rizari  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)  
Email: [rizari@ipdn.ac.id](mailto:rizari@ipdn.ac.id)

Received: January 20 ,2020  
Revised : February 25 ,2020  
Accepted: February 28 ,2020  
Available Online: April 30 ,2020

### Abstract

*The patron-client relationship had been emerged as it embedded in social relation of production among fishing community. This article is attempt to explain the articulation of patron-client relationship that emerged among coastal fishing community in Makassar City. Qualitative method was used to collect data. Mostly, ethnographic approach was used to identified and observe the articulation of power reallion. This study has discover that patron client is not merely exist in social economy activities. Contemporary issue also indicates that this dynamic has also interfered the power relationship among coastal fishing community.*

*Keyword: power relationship, patron client, fishing community*

### Abstrak

Hubungan patron klien telah muncul sebagaimana hubungan tersebut melekat dalam hubungan sosial produksi dalam masyarakat nelayan. Artikel ini berusaha untuk menjelaskan artikulasi hubungan patron-klien yang terjadi di antara masyarakat perikanan di pesisir Kota Makassar. Metode kualitatif digunakan dalam proses pengambilan data. Sebagian besar dari keseluruhan pengambilan data dilakukan dengan pendekatan etnografi untuk mengidentifikasi dan mengamati artikulasi hubungan kekuasaan. Artikel ini mendapati bahwa patron-klien tidak hanya terwujud dalam hubungan sosial ekonomi saja. Kondisi yang terjadi juga menunjukkan bahwa dinamika tersebut telah mengintervensi hubungan kekuasaan di dalam masyarakat perikanan di pesisir.

*Keyword: hubungan kekuasaan, patron klien, masyarakat pesisir.*

### Pendahuluan

Dinamika di beberapa daerah pesisir di negara sedang berkembang, masyarakat nelayan tradisional tidak dapat dilepaskan dari eksistensi satu bentuk hubungan yang populer disebut sebagai hubungan patron klien. Hubungan ini ditandai oleh ikatan emosional dan psikologis yang erat. Ikatan ini juga mengindikasikan perikatan yang lebih dari sekedar hubungan ekonomi, akan tetapi terartikulasi dengan jelas dalam dinamika sosial masyarakat. Ikatan emosional tersebut juga biasanya melibatkan orang-orang terdekat dari salah satu pihak (biasanya keluarga klien) dan telah berlangsung dalam kurun waktu cukup lama (Eisenstadt dan Roniger, 1984). Hal yang demikian juga dijumpai di dalam masyarakat nelayan di kawasan pesisir Kota Makassar. Hubungan semacam ini seringkali dipandang sangat merugikan bagi nelayan yang diposisikan sebagai klien. Namun, sebahagian pihak justru menganggap bahwa hubungan

semacam ini adalah manifestasi dari jaringan sosial yang dapat membantu nelayan tradisional untuk bertahan hidup di tengah arus pembangunan Kota Makassar yang terbilang sangat pesat.

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan artikulasi hubungan patronase di dalam masyarakat nelayan di Kota Makassar. Makalah ini disusun berdasarkan atas sebuah penelitian lapangan yang dilaksanakan sejak minggu pertama bulan Desember 2018 sampai dengan pertengahan bulan Februari 2019.

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks hubungan sosial ekonomi nelayan di lokasi kajian (Sudarmono, 2012); konteks hubungan kekuasaan (Nurdin & Grydehøj, 2014) dan konteks patronase dan hubungan politik (Leo Agustino & Yusoff, 2010).

Dalam penelitiannya, Sudarmono (2014) dan Sudarmono et al. (2012a; 2012b; 2012c)

mengemukakan bahwa masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor perikanan menunjukkan gejala kerentanan sosial yang ditandai dengan kebergantungan kepada pemilik modal dan kekuasaan. Penelitian ini ingin menguji apakah pola kekuasaan itu tidak hanya terbatas pada hubungan ekonomi saja. Nurdin & .... (2017) juga menggambarkan hal yang hamper sama. Perilaku penangkapan ikan secara destruktif sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Dengan latar setting lingkungan yang berbeda, penelitian ini menunjukkan bagaimana dinamika urban ikut berperan dalam menguatkan hubungan klientelisme. Hal yang hamper sama juga dikemukakan oleh Agustino & Yusoff (2010) dimana peran sebagai *roving bandit* sangat jelas melekat dalam figure seorang patron. Namun, pendekatan hubungan sosial kemanusiaan, nampaknya penelitian ini menemukan sisi yang lebih baik dari figur seorang patron.

#### *Kerangka Teori*

Pada dasarnya, analisis atas hubungan patron-klien lebih sering dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori pertukaran sosial. Teori ini secara fundamental berasal dari beberapa disiplin, diantaranya psikologi, antropologi, sosiologi dan mikroekonomi. Dari beberapa pemikir klasik yang secara rinci mengkaji teori pertukaran sosial, nampaknya pandangan Homans, Peter Blau dan Emerson terbilang cukup relevan untuk

digunakan dalam menganalisis kajian ini. Blau melihat bahwa terbentuknya kerangka pikir pertukaran sosial didasari atas pertukaran resiprokatif secara ekonomi yang pada akhirnya membentuk interaksi sosial dalam konteks yang lebih mikro (Ritzer, 2004).

Meskipun tidak sepenuhnya berbeda dengan apa yang diketengahkan oleh Blau, Homans lebih melihat interaksi sosial dapat terbentuk sebagai hasil dari simbiosis mutualisme antara dua pihak yang terlibat dalam sebuah pertukaran yang bersifat diadik. Pertukaran secara langsung ini pada akhirnya berimplikasi terhadap distribusi kekuasaan, penguatan status sosial, penguatan status kepemimpinan serta kewenangan. Pandangan ini terus disempurnakan oleh Emerson. Analisis yang dilakukan oleh Emerson mulai melihat bahwa pertukaran ini tidak hanya berkaitan dengan pertukaran secara ekonomi dan sosial, namun lebih dari itu, pertukaran ini juga telah menciptakan ketidakseimbangan dan ketergantungan. Emerson juga melihat bahwa hubungan ini telah membentuk satu jaringan yang menghubungkan pihak-pihak yang melakukan pertukaran. Pertukaran ini juga melahirkan kekuasaan yang bersumber dari kedudukan sosial yang lebih tinggi serta penguatan jaringan sosial yang mencakupi pihak-pihak yang lebih rendah kedudukan dalam pranata sosialnya. Secara jelas, Emerson menyatakan bahwa hubungan antara kekuasaan dan struktur sosial adalah

kerangka utama yang menyusun teori pertukaran sosial (Ritzer, 2004).

Pada pertengahan dekade 1990-an, kerangka pemikiran teori pertukaran sosial semakin dipertajam oleh Molm dan Cook (1995) sebagaimana dikutip oleh Ritzer (2004). Menurut Molm dan Cook (1995), asumsi dasar dari teori ini adalah sebagaimana kutipan berikut ini:

*“ The key assumptions of exchange theory include the following: (1) Behavior is motivated by the desire to increase gain and to avoid loss (or to increase outcomes that are positively valued and to decrease outcomes that are negatively valued), (2) exchange relations develop in structures of mutual dependence (both parties have some reason to engage in exchange to obtain resources of value or there would be no need to form an exchange relation), (3) actors engage in recurrent, mutually contingent exchanges with specific partners over time (i.e., they are not engaged in simple one-shot transactions), and (4) valued outcomes obey the economic law of diminishing marginal utility (or the psychological principle of satiation).”*

Berdasarkan asumsi ini, pelbagai prediksi dapat dikemukakan berkaitan dengan aktor yang terlibat pertukaran serta dampak yang berbeda-beda sebagai akibat pertukaran tersebut.

Pada akhirnya, prinsip-prinsip ketergantungan kekuasaan telah mendorong pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk menarik surplus yang berasal dari sumber daya yang dipertukarkan, termasuk menjamin ketersediaan sumber-sumber daya dari beberapa sumber yang baru.

Selain itu, hubungan patron-klien dapat digolongkan sebagai hubungan yang asimetris antara patron atau atasan dengan beberapa klien. Klien disini dapat bermakna sebagai bawahan, pengikut ataupun pelayan. Pertukaran yang tidak sejajar ini memiliki makna yang sangat luas. Patron bergantung kepada para kliennya yang memberikan pelayanan cuma-cuma melebihi kewajiban ekonomisnya, tugas-tugas yang berupa maupun tidak berupa, menjadi prajurit perang, dukungan politik, dan pelayan lainnya. Sementara itu, patron juga berperan sebagai sosok pemimpin bagi kliennya, pemberi bantuan, termasuk pinjaman uang serta perlindungan sosial yang disediakan oleh sang patron (Pelras, 1981)

Dalam konteks kekinian, hubungan yang tidak seimbang ini sangat dimungkinkan berkaitan erat dengan dimensi kapital, dimana salah satu pihak juga memerlukan akses modal yang disediakan oleh pihak lainnya. Lebih dari itu, hubungan ini juga masih berkaitan erat konteks politik dan bahkan melembaga dalam institusi formal pemerintahan (Kausar, 2008). Pada gilirannya, isu patronase dapat pula dikaji dalam pandangan teori

pembangunan. Menurut Tain (2010), pendekatan ketergantungan dalam teori pembangunan adalah kerangka teoretikal yang sangat relevan bagi melihat dan mengeksplorasi fenomena kemiskinan nelayan di Indonesia.

Meskipun jargon *bottom-up* dalam memberdayakan masyarakat begitu dikedepankan sejak era desentralisasi, namun kenyataan atas dinamika pembangunan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan *top-down*. Pelbagai peraturan di daerah secara teknis masih dikawal oleh pusat melalui juklak-juklak dan peraturan-peraturan menteri, seolah-olah pihak pusat enggan melepas kewenangan pembangunan kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat sepertinya enggan melihat konteks lapangan yang sangat beragam dan memerlukan penjabaran peraturan mengikut konteks lokal (Junaenah Sulehan, et. al, 2008)

Walhasil, ambiguitas yang terjadi justeru kian mengantar dinamika pembangunan saat ini menjadi salah satu tekanan struktural bagi nelayan kecil; sementara pada saat yang bersamaan elit-elit pada peringkat mikro berpeluang mengambil keuntungan lebih dengan mengatasnamakan “pemberdayaan masyarakat”. Keadaan ini mempertegas bahwa kemiskinan dan ketergantungan nelayan sesungguhnya didominasi oleh tekanan-tekanan yang bersifat struktural, baik melalui struktur formal yang memberikan peluang kepada elit lokal di daerah untuk mengeruk keuntungan melalui kebijakan

pembangunan; maupun melalui struktur sosial yang menempatkan nelayan kecil sebagai pihak yang memerlukan modal dan bantuan dari patronnya.

### Metode Penelitian

Desain utama penelitian ini adalah kualitatif dengan didasari oleh pendekatan etnografis terhadap fenomena hubungan sosial ekonomi di masyarakat tradisional. Teknik pengambilan data dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dengan beberapa informan utama; dan observasi terhadap pola artikulasi serta beberapa analisis dokumen yang diinterpretasi menjadi narasi-narasi yang menjadi pembanding atas temuan-temuan observasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan beberapa orang informan kunci. Pemilihan informan tersebut didasarkan atas keterlibatan informan dalam struktur patron-klien serta keterlibatan informan dalam struktur sosial masyarakat di kawasan penelitian. Penelitian lapangan dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Kelurahan Cambayya dan Kelurahan Tallo, Kota Makassar.

## Hasil dan Pembahasan

*Perkembangan Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah retrospektif*

Apabila membicarakan hal ihwal tentang patronase di masyarakat Bugis Makassar, maka apa yang pernah ditulis oleh Pelras (1981) masih menjadi salah satu rujukan yang dapat memberikan gambaran yang cukup utuh, selain yang pernah ditulis oleh Mattulada (1988). Meskipun pendekatan antropologi lebih mendominasi tulisan mereka, namun pendekatan tersebut telah menjadi pintu masih untuk melihat hubungan patronase secara mendalam dari beberapa dimensi yang berbeda, terutama dimensi politik dan ekonomi pembangunan. Dari semua tulisan mereka tentang patronase di Sulawesi Selatan, pencapaian strata sosial, gengsi dan pengaruh politik adalah faktor-faktor utama yang mendorong terbentuknya hubungan patron klien dalam masyarakat. Hanya saja, hubungan tersebut berkembang dan mengalami konfigurasi yang berbeda-beda mengikut konteks ruang dan waktu. Dalam kajian ini, perkembangan patronase akan digambarkan dalam dua kurun sejarah, yaitu sebelum kemerdekaan (sebelum tahun 1945) dan setelah kemerdekaan (setelah tahun 1945).

Jazirah Sulawesi Selatan menjadi begitu diminati oleh bangsa Eropa bukan hanya karena kekayaan alamnya, tetapi juga karena wilayah ini juga memiliki dinamika sosial yang sangat dinamis, melibatkan dua rumpun besar

(Bugis dan Makassar) serta perilaku migrasi masyarakatnya yang semakin membentuk pluralisme dan keterbukaan di Sulawesi Selatan (Sutherland, 2009). Salah satu khazanah sosialnya adalah organisasi dan struktur sosial Bugis Makassar tradisional. Struktur sosial masyarakat Bugis Makassar mencakup stratifikasi sosial yang mengatur kedudukan dan status sosial di dalamnya; serta sistem pemerintahan yang membagi masyarakatnya dalam beberapa wilayah teritorial. Sementara itu, salah satu pranata sosial yang memungkinkan terjadinya mobilitas sosial adalah dengan adanya hubungan patron-klien. Melalui sistem tersebut, pengaruh kekuasaan dan pelapisan sosial sederhana menjadi sangat penting diperjelaskan (Pelras, 1981).

Bagi kalangan aristokrasi di Sulawesi Selatan pada dekade pra kolonial, memiliki pengikut yang cukup banyak adalah perkara yang sangat penting. Pengikut dapat berarti prajurit atau pasukan dalam angkatan perang ataupun pelayan yang mengabdikan kepada keluarga bangsawan. Dalam hal ini, hubungan patron klien lebih nampak sebagai hubungan kekuasaan secara politik berbanding hubungan ekonomi yang ditandai pertukaran barang dan jasa. Selain itu, indikator kekuasaan politik juga tampak pada sistem kontrol atas tanah-tanah yang berada dalam wilayah teritorial pemerintahannya. Sistem kontrol yang dimaksudkan disini tidak selalu bermakna kepemilikan. Para bangsawan yang bertindak sebagai

patron menguasai lahan yang sangat luas, sementara rakyat biasa yang tidak memiliki lahan biasanya bertindak sebagai petani penggarap atas tanah-tanah tersebut. Hasil dari garapan tanah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga petani tersebut dan tentunya juga untuk membayar pajak atas pemanfaatan tanah tersebut kepada kalangan bangsawan.

Di dalam masyarakat tradisional Sulawesi Selatan pada masa pra kolonial, status hukum pertanahan berdasarkan hukum adat terbilang sangat beragam. Keberagaman ini berdampak kepada pola penguasaan, sistem pajak dan sistem bagi hasil yang melibatkan keluarga bangsawan sebagai patron dan rakyat jelata sebagai kliennya. Keberagaman ini juga dengan sendirinya telah memberikan gambaran bahwa pihak raja beserta keluarganya memiliki sumber pendapatan yang cukup banyak dari rakyatnya dan pendapatan ini kemudian digunakan untuk membiayai semua aktifitas pemerintahan, termasuk untuk kebutuhan pangan, bahkan pakaian para pengikut-pengikut di istana, seperti pelayan, dayang-dayang serta keluarga prajurit. Selain itu, kerabat kerajaan yang berstatus bangsawan rendah juga biasanya mendapatkan sebahagian kecil dari pendapatan kerajaan. Bagi kalangan penguasa, membiarkan orang-orang di sekitar kerajaan dalam kemiskinan adalah aib dan sangat memalukan bagi kalangan elit kerajaan.

Dengan masuknya pihak kolonial Belanda di Sulawesi Selatan, kekuasaan

atas sumber-sumber daya alam perlahan-lahan diambil alih oleh kaum kolonial, dan dengan sendirinya telah menyebabkan pengaruh politik kaum bangsawan juga mengalami penurunan. Sebahagian besar pendapatan mereka yang bersumber dari fungsi-fungsi pemerintahan semakin berkurang, dan hal ini secara langsung berdampak terhadap kekuatan ekonomi kerajaan yang semakin menurun.

Tidak hanya setelah masuknya bangsa kolonial, perubahan besar juga masih terus terjadi setelah periode sekitar kemerdekaan. Pemilikan dan penguasaan lahan oleh kaum bangsawan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Patron dari kalangan bangsawan tidak lagi memiliki posisi untuk memberikan lahan kepada para pengikutnya, sebagaimana yang terjadi pada jaman dahulu. Kekayaan mereka pun semakin berkurang, terutama setelah kekayaan tersebut diwariskan kepada generasi penerusnya. Dalam kaitan hubungannya dengan para pengikut, bangsawan harus mengeluarkan banyak biaya untuk mempertahankan prestise selama mungkin. Jika masih tetap ingin bertindak sebagai patron, darah kebangsawanannya tidak cukup untuk membayar mahalannya gengsi aristokasi yang harus dipertahankan. Terlebih lagi, mereka diperhadapkan oleh kemunculan elit-elit baru dari kalangan masyarakat biasa yang umumnya berasal dari kalangan militer dan cendekiawan. Olehnya itu, kalangan aristokrasi terpaksa harus menerapkan

strategi baru. Salah satu yang mereka lakukan adalah dengan menyekolahkan generasi-generasi aristokrasi baru pada institusi yang memungkinkan mereka tetap meregenerasi fungsi kendali teritorialnya. Pelras (1981) menyebutkan bahwa pada dekade 1970-an, kalangan generasi aristokrat muda umumnya menempuh pendidikan di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) untuk tetap mempertahankan pengaruhnya pada pemerintahan tingkat kecamatan.

Secara umum, uraian ini telah menggambarkan trajektori dan eksistensi patronase yang telah terbentuk sebelum kedatangan bangsa kolonial dan masih bertahan sampai beberapa dekade selepas kemerdekaan. Meskipun sistem dan pranata sosial masyarakat pasca kemerdekaan semakin terbuka, akan tetapi hubungan patronase masih dapat ditemukan, terutama berkaitan dengan aktifitas ekonomi dan pertanian masyarakat kelas non aristokrasi.

#### *Pembangunan dan Kemiskinan di Kota Makassar*

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Todaro (1997), pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan secara fisik, akan tetapi di dalamnya berkaitan erat dengan kesejahteraan sosial. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan dalam konteks sosial, maka Indeks Pembangunan Manusia (*human development index*) adalah salah satu indikator yang kerap digunakan bagi

mengukur kemajuan pembangunan manusia dalam satu wilayah. Pembangunan manusia di Kota Makassar senantiasa menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan, di mana pada tahun 2009, indeks tersebut telah mencapai angka 78.24. Angka ini jauh di atas capaian Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya mencapai 70.94 (Kota Makassar Dalam Angka, 2011).

Pembangunan Kota Makassar sebagaimana halnya kota-kota besar di negara-negara berkembang tidak pernah lepas dari fenomena kemiskinan perkotaan. Kemiskinan di Kota Makassar disebabkan oleh pelbagai faktor, terutamanya disebabkan oleh urbanisasi (Kota Makassar Dalam Angka, 2011). Arus urbanisasi semakin tidak dapat dikendalikan, di mana masyarakat senantiasa melihat Kota Makassar sebagai satu kota yang memberikan harapan. Terlebih lagi jika mencermati pola koordinasi pembangunan yang sangat semrawut sehingga terkesan bahwa koordinasi pembangunan adalah ritual kantor biasa, tidak lagi melihat kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Hal tersebut mengakibatkan penanganan masyarakat miskin semakin sukar dilaksanakan.

#### *Artikulasi Hubungan Patron Klien*

Secara umum, realitas hubungan sosial dalam masyarakat nelayan dapat dianalisis melalui pendekatan moda produksi yang mereka geluti. Melalui

pendekatan ini pulalah, hubungan patron klien dimana mereka memainkan peranan masing-masing dapat lebih ditemukenali. Moda produksi terdiri dari dua komponen dasar, yaitu variabel kekuatan produksi (*force of production*) dan hubungan sosial produksi (*social relation of production*) (Hindess dan Hirst, 1975). Meskipun dinamika sejarah yang telah diuraikan sebelumnya lebih menekankan pada hubungan kekuasaan, akan tetapi sesungguhnya, prinsip-prinsip kapitalisme dan pengumpulan modal juga menjadi pendorong utama artikulasi moda produksi tersebut. Pada akhirnya, penguatan kekuasaan dan kapitalisme seperti berjalan beriringan dalam sebuah perikatan antara patron dan kliennya.

Sebelum membahas lebih jauh tentang dinamika hubungan patron-klien di pesisir Kota Makassar, maka perlu untuk diketahui bahwa hubungan patron-klien di kawasan pesisir lebih dikenali dengan istilah *punggawa-sawi*. Berdasarkan definisi konsep dari beberapa peneliti-peneliti sebelumnya (Pelras, 1981; Yusran, 2002), konsep *punggawa* selalu merujuk kepada figur dan peranan seorang patron. Sementara konsep *sawi* merujuk kepada klien. Selama penelitian lapangan dilakukan, tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara konsep *punggawa* sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana terdahulu dengan apa yang menjadi temuan kajian ini, baik berkaitan dengan sifat ke-*punggawa*-annya maupun perannya dalam struktur

sosial. Berbeda halnya dengan konsep *sawi*. Penelitian ini mendapati pergeseran makna *sawi*. Istilah *sawi* saat ini telah bergeser dari temuan penelitian-penelitian terdahulu. Status *sawi* sudah dipandang sebagai sebuah status sosial yang sangat rendah, meskipun selama penelitian ini dilakukan, masih banyak ditemukan nelayan-nelayan buruh yang menjalankan pekerjaan sebagai buruh namun sudah enggan dipanggil sebagai *sawi*<sup>1</sup>. Oleh karena untuk menghindari persepsi yang beragam, maka istilah *sawi* tidak digunakan dan tetap menggunakan istilah klien.

Sebagaimana yang telah dinyatakan pada bahagian pertama, bahwa makalah ini bertujuan untuk menganalisis dinamika artikulasi hubungan patron klien di dalam masyarakat nelayan, maka dari itu akan diketengahkan dua contoh kasus di dua kawasan nelayan yang berbeda. Dinamika tersebut telah menjadi sebuah fragmen dari episode panjang dinamika patronase yang melingkupi masyarakat tradisional pesisir Bugis Makassar. Dinamika dalam masyarakat nelayan di pesisir Kota Makassar menjadi begitu menarik oleh karena hubungan patron klien di dalamnya masih tetap bertahan meskipun dinamika ekonomi perkotaan tentu saja memberikan tekanan-tekanan lain.

#### *Studi Kasus I: Pemilihan Ketua LPM di Tallo*

Studi kasus pertama yang diketengahkan adalah hubungan

patronase yang tercermin melalui pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Tallo. Dalam kasus ini, pola hubungan patronase memungkinkan pihak patron mendapatkan kekuatan secara politis demi mengukuhkan pengaruhnya di dalam masyarakat.

Kedudukan LPM dalam masyarakat terbilang sangat strategis dalam masyarakat. LPM adalah bentuk mutakhir dari lembaga legislatif masyarakat desa atau kelurahan yang pada masa pemerintahan orde baru lebih dikenal sebagai LKMD. LPM beranggotakan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat yang merepresentasikan unit-unit masyarakat yang lebih kecil (RT dan RW), ataupun kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, misalnya tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Kedudukan antara LPM dan pemerintah desa atau kelurahan adalah sejajar. Secara normatif, keduanya memainkan fungsi kemitraan, meskipun pada kenyataannya terkadang kewenangan LPM seringkali melampaui kewenangan pihak pemerintah desa atau kelurahan. Oleh sebab itu, konflik diantara mereka sangat mungkin terjadi.

Oleh karena perannya yang sangat strategis ini, maka diperlukan sebuah dukungan yang kuat dari masyarakat untuk merebut kedudukan sebagai ketua LPM. Dan dengan tujuan ini pulalah, sering kali pertarungan antara elit dan unjuk kekuatan massa dalam masyarakat nelayan menjadi tidak dapat dielakkan. Beberapa proses peralihan kepengurusan beberapa LPM

di Kota Makassar diwarnai dengan pertikaian antar elit, meskipun tidak sampai saling mencederai. Untuk memenangi pertarungan ini, para *punggawa* ataupun kalangan elit masyarakat akan mengerahkan segenap nelayan kliennya, termasuk keluarga nelayan klien untuk menyatukan kekuatan dan memenangkan *punggawa*-nya masing-masing.

Jika pada masa orde baru, pembangunan lebih mengedepankan pendekatan *top-down*, maka sejak penerapan prinsip desentralisasi, paradigma pembangunan saat ini lebih mengedepankan pendekatan *bottom-up*. Meskipun begitu, penerapan kedua pendekatan ini malah menjadi semakin tidak jelas. Hal ini disebabkan kuatnya pengaruh strukturalis cenderung tidak melihat karakteristik masyarakat setempat yang menjadi objek pembangunan. Selain itu, bias-bias atas penerapan pendekatan *bottom up* justru melanggengkan pengaruh elit-elit di tingkat kelurahan dan desa. Jika pada beberapa dekade sebelumnya, pihak pemerintah desa dan kelurahan berperan penting dalam mendistribusikan proyek-proyek pembangunan, maka apa yang terjadi saat ini adalah peranan tersebut diambil alih oleh elit-elit pada tingkat kelurahan, dengan melembagakan atau melegitimasi perannya melalui lembaga seperti LPM.

Kasus yang kerap terjadi dalam masyarakat nelayan adalah persoalan distribusi bantuan dari pihak luar masyarakat nelayan, baik dari

pemerintah, NGO atau pun sumber-sumber lain, termasuk calon anggota legislatif atau calon kepala daerah. Pola yang sering terjadi adalah sebelum penyaluran bantuan dilaksanakan, biasanya dilakukan suatu penilaian untuk melihat profil kelompok-kelompok sasaran. Proses penilaian ini kemudian dilegitimasi sedemikian rupa, sehingga melahirkan sebuah tim kerja yang terdiri perwakilan setiap kelompok-kelompok yang terlibat. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kelompok-kelompok nelayan selalu diwakili oleh *punggawa*-nya, sementara nelayan klien tidak pernah terlibat dalam pertemuan. Nelayan kecil hanya menerima saja hasil rapat, sementara aspirasi yang seharusnya disuarakan cukup diwakili oleh pengurus LPM.

Peranan patronase mulai nampak ketika bantuan-bantuan tersebut disalurkan ke kelompok-kelompok nelayan. Selama penelitian ini dilaksanakan, tidak pernah didapatkan satu parameter yang obyektif untuk mengukur skala prioritas dalam menentukan pihak-pihak mana yang dapat didahulukan. Bantuan-bantuan umumnya mengalir kepada nelayan-nelayan yang telah menjadi klien sang *punggawa*, sementara nelayan yang tidak berada dalam lingkaran kekuasaannya tidak mendapatkan bantuan.

Setelah mendeskripsikan bagaimana LPM mengartikulasi perannya yang terbilang strategis, maka perlahan mulai terungkap mengapa peran LPM begitu diperebutkan oleh

beberapa elit dalam komunitas nelayan. Penelitian ini membuktikan bahwa bentuk penyalagunaan kewenangan juga menghinggapi para elit dalam kelompok masyarakat yang terbilang mikro sekalipun.

Perilaku oknum pengurus LPM yang menguntungkan kelompoknya tidak sampai disitu. Fenomena lain yang teridentifikasi adalah pada implementasi program pembangunan fisik, yaitu pemasangan *paving blok* di jalan-jalan desa. Beberapa kasus yang ditemukan di Kota Makassar menunjukkan bahwa pembangunan fisik dalam satu lingkungan RT seringkali menimbulkan permasalahan, baik dalam konteks kualitas hasil proyek maupun ekses-ekses sosial lainnya.

Bagi kelompok-kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik, semua tahapan-tahapan pembangunan telah dilaksanakan sesuai prosedur serta berlangsung dengan cukup transparan. Untuk menguatkan pandangan ini, pihak elit LPM seringkali memanfaatkan nelayan kliennya untuk menyebarkan opini bahwa pembangunan tersebut sudah sangat membantu masyarakat. Sememangnya diakui bahwa pembangunan tidak mungkin memberikan kepuasan bagi semua pihak, akan tetapi pandangan apriori masyarakat menunjukkan bahwa pembangunan cenderung lebih menguntungkan pihak pengambil keputusan berbanding masyarakat pada umumnya. Kapasitas sang patron (*punggawa*) sebagai pengambil

keputusan tidak dapat dielakkan turut memuluskan penempatan lokasi proyek sesuai keinginannya. Meskipun begitu, sebahagian besar masyarakat cenderung menerima saja hasilnya.

### *Studi Kasus II: Fenomena Kompradorasi di Cambayya*

Jika kedua bentuk artikulasi tersebut lebih melihat hubungan antara *punggawa* sebagai elit yang berpengaruh dengan nelayan sebagai klien dan anggota masyarakat biasa, maka penjelasan berikut justeru mengetengahkan konfigurasi baru atas hubungan patron klien. Berdasarkan pengamatan di lapangan, dinamika patron klien dalam masyarakat nelayan di Makassar juga membentuk hubungan antara *punggawa* sebagai elit dalam masyarakat nelayan dengan kelompok pemodal yang berasal dari luar masyarakat nelayan Cambayya. Kelompok pemodal ini sangat berkepentingan untuk menjalankan investasinya, termasuk mengamankan posisi dan kepentingan bisnis kelompok pemodal yang mendapat ancaman dari pemodal yang lainnya. Sasono dan Sritua Arif (1984) menyebut kelas elit lokal dari kalangan nelayan seperti ini sebagai kelas komprador. Sementara itu, Satria (2001) menyebut bahwa fenomena kompradorasi ditandai dengan adanya perlindungan kepada pemodal yang dilakukan oleh elit lokal untuk melancarkan investasinya serta adanya tukar menukar kekuatan dan kekuasaan antara kelompok-kelompok yang terlibat. Perlindungan dan

pengamanan dalam konteks ini sangat penting. Alasan utama yang kerap dikemukakan oleh masyarakat nelayan adalah bahwa pola penangkapan yang dijalankan oleh pemodal dari luar ini adalah lebih didominasi oleh cara-cara *illegal fishing*. Salah satu pola *illegal fishing* yang diungkap dalam tulisan ini adalah penggunaan bius ikan.

Penggunaan bius ikan pertama kali di perairan Makassar dikenalkan oleh nelayan-nelayan dari Hongkong pada awal-awal dekade 1980-an. Nelayan-nelayan tersebut dibawa oleh pengusaha lokal yang memiliki afiliasi bisnis yang kuat dengan beberapa pebisnis di Hongkong. Mereka mengenalkan cara penangkapan dengan bius. Cara ini berlangsung cukup berhasil oleh karena (1) kontur geografis perairan Makassar yang terdiri atas gugusan pulau-pulau kecil dimana terdapat banyak terumbu karang diantaranya; dan (2) keahlian menyelam yang dimiliki oleh pelaut-pelaut Makassar yang sangat ulung dan sudah terkenal sejak beberapa abad silam. Sutherland (2009) bahkan menyebutkan dalam jurnalnya bahwa kemunculan Makassar sebagai salah satu emporium ekonomi paling maju pada abad ke 17 tidak dapat lepas dari peranan pedagang cina pendatang yang piawai berdagang dan bermukim di Makassar berasimilasi dengan kemampuan penyelaman masyarakat Makassar untuk mengambil komoditi di laut, terutama Teripang.

Proses pembiusan ikan dilakukan dengan menyebarkan zat-zat kimia ke

dalam terumbu karang, dimana terdapat banyak ikan-ikan bernilai ekonomis sangat tinggi. Jika pembiusan ini berhasil, ikan-ikan yang terdapat dalam terumbu karang akan keluar dalam kondisi yang lemas (mulai terbius). Pada saat seperti ini, ikan-ikan tersebut akan ditangkap sedemikian rupa dan diangkat ke atas perahu nelayan. Proses ini tentunya memerlukan kemampuan penyelaman secara tradisional, sementara residu zat kimia yang disemburkan akan tetap bereaksi dan merusak sebahagian ekosistem dasar laut.

Dinamika patronase tidak luput dari fenomena ini. *Punggawa* menjadi figur sentral dalam hubungan seperti ini. Peran utama *punggawa* adalah menyediakan nelayan penyelam yang bertugas menyemburkan zat kimia ke dalam terumbu karang. Mendapatkan nelayan penyelam yang dapat diajak bekerjasama bukan sebuah perkara yang sulit.. Untuk mencari nelayan yang direkrut, pertimbangan utama tentunya masih seputar hubungan ekonomi yang menempatkan nelayan penyelam sebagai pencari kerja dan patron sebagai pihak yang menghubungkan dengan pemodal (baca: pengimpor) yang memiliki dana.

Peran yang tak kalah pentingnya adalah ketika *punggawa* juga memberikan jaminan keamanan kepada pengimpor. Jaminan keamanan ini berkenaan dengan keberadaan kolam pencernaan ikan yang berfungsi untuk menetralkan sisa-sisa busuk yang masih melekat dalam tubuh ikan, dan

membiarkan ikan tersebut untuk dapat bergerak secara normal kembali. Kolam-kolam tersebut dibuat di dalam sebuah gedung yang juga berfungsi sebagai tempat *packing* ikan-ikan hidup untuk kemudian diekspor. Untuk menjamin keamanan gedung ini, *punggawa* melibatkan beberapa pihak lainnya, terutama pihak keamanan resmi. Selama penelitian dilaksanakan, tidak didapatkan bukti nyata mengenai keterlibatan pihak-pihak tertentu, selain hanya berupa ungkapan-ungkapan beberapa informan yang itupun tidak lebih dari sekedar informasi yang sulit mereka buktikan. Namun justeru dengan fenomena demikian ini, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa keberadaan mereka tidak diketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya, kecuali sang patron yang mengontrol kegiatan itu.

Jaminan keamanan dalam konteks ini dapat juga diartikan sebagai kemampuan pihak elit dalam masyarakat nelayan untuk meredam gejolak pihak-pihak yang tidak senang atas keberadaan pola ini. Tentu sesuatu yang ironis ketika disekitar lokasi pengamatan terdapat beberapa kolam penjernihan, akan tetapi tidak semua masyarakat disitu mengetahui siapa pemilik pastinya.

### **Kesimpulan**

Eksistensi hubungan patron klien dalam masyarakat nelayan di Kota Makassar saat ini adalah sebuah proses panjang yang telah bertahan selama puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Seiring

dengan perkembangannya, patron klien telah menjadi bagian dari transformasi sosial ekonomi masyarakat nelayan. Analisis atas sejarah panjang hubungan patron klien di Sulawesi Selatan, hubungan patron klien tidak terbatas hanya kepada hubungan ekonomi saja, melainkan juga telah menjadi bagian penting dalam konstalasi politik kontemporer. Kajian ini mendapati bahwa hubungan patron klien dalam masyarakat nelayan telah mengalami konfigurasi dan menemukan satu bentuk baru. Pada tataran mikro, hubungan patron klien berkaitan erat dengan tarik ulur pengaruh dan kekuasaan untuk merebut dan mempertahankan status sosial yang lebih tinggi.

Transformasi penting yang melingkupi masyarakat nelayan berkaitan dengan eksistensi hubungan patron klien saat ini adalah bahwa artikulasi hubungan patron klien telah memetakan masyarakat nelayan ke dalam status-status sosial yang semakin jelas sekatnya. Pada awal kemunculannya, hubungan ini didominasi oleh kekentalan sifat tradisional masyarakat nelayan. Namun, dengan kehadiran teknologi dalam masyarakat nelayan, masyarakat tidak hanya terbentuk dalam gugusan strata sosial yang semakin jelas, akan tetapi juga telah membentuk kelas sosial yang baru.

## Daftar Referensi

1. Agustino, L. & Yusoff, M. A. (2010). Pilkada dan Pemekaran daerah dalam demokrasi local di Indonesia: Local Strongmen and Roving bandits. *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategies Studies*, Vol. 37: 86-104 <http://journalarticle.ukm.my/345/>
2. Althusser, L. & Balibar, E. (1970). *Reading Capital*. London: New Left Book
3. Arief, S. & Sasono, A. (1981). *Indonesia: Ketergantungan dan Keterbelakangan*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan
4. Biro Pusat Statistik Kota Makassar, 2011. *Kota Makassar Dalam Angka Tahun 2008*. Makassar: BPS
5. Dyer, C. L. (1990). *Sharing The Fishing: Resource Utilization and Kinship Cooperation in Three Mexican Artisanal Community*. Ph.D Thesis. Arizona State University.
6. Eisenstadt, S. N. & Roniger, L. (1984). The Study of Patron-Client Relation and Recent Development in Sociological Theory. dlm. Eisenstadt, S. N. Dan Roniger, L. 1981. *Political Clientelism, Patronage and Development*. London: Sage Publication
7. Hindess, B. dan Hirst, P. (1975). *Pre-Capitalist Mode of Production*. London: Routledge & Keegan Paul
8. Homans, G.C. (1961). *Social Behaviour: Its Elementary Form*. New York: St. Martin's Press Ltd

9. Sulehan, J., Liu, O. P., Ibrahim, Y., Abubakar, N. H., Awang, A. H., Yusof, M., & Abdullah, H. (2008). Penyertaan dan Pemerksaan Komuniti Desa dan Pembangunan di Malaysia-Indonesia. *Jurnal Kajian Politik dan Pembangunan* 4(2): 281-300.
10. Kausar. (2009). *Sistem Birokrasi Pemerintahan di Daerah Dalam Bayang-Bayang Budaya Patron-Klien*. Bandung: PT Alurni.
11. Mattulada. A. (1995). Traditional Management among Bugis-Makassar Enterpreneurs in South Sulawesi. Dlm. *Lontara. Journal of Hasanuddin University*. Vol. 1. No. 2 hlm. 23-28
12. Mulyadi. (2007). *Ekonomi Kelautan*. Jakarta. Pt. Raja Grafindo Persada.
13. Nurdin, N. & Grydehoj, A. (2014). Informal governance through patron–client relationships and destructive fishing in Spermonde Archipelago, Indonesia. *Journal of Marine and Island Cultures* 3, 54–59.  
<https://doi.org/10.1016/j.imic.2014.11.003>
14. Pelras, C. (1981). *Hubungan Patron-Klien pada Masyarakat Bugis Makassar*. Monograf. Ujung Pandang
15. Ritzer, G. (2004). *Encyclopedia of Social Theory*. London: Sage Publication
16. Satria, A. (2001). *Dinamika Modernisasi Perikanan: Bentuk masyarakat dan Mobilitas Nelayan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
17. Scott, J. C. (2000). *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah: Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
18. Siswanto, B. (2008). *Kemiskinan dan Perlawanan Kaum Nelayan*. Malang. Laksbang Mediatama
19. Sudarmono, Sulehan, J. & Noor Rahamah Hj. Abu Bakar. (2012). Patron-Client Relationship of Urbanized Fishing Community. *International Journal on Social Science Economics & Art*. Vol. 2 (2012) No. 2.  
[[www.insightsociety.org/ojssea/index.php/ijsssea/article/view/82](http://www.insightsociety.org/ojssea/index.php/ijsssea/article/view/82)]
20. Sudarmono, Sulehan, J. Noor Rahamah Hj. Abu Bakar. (2012). Globalisasi Industri Perikanan: Dampak terhadap komuniti nelayan lokal di pesisiran pantai Kota Makassar, Indonesia. *GEOGRAFIA. Journal of Society and Space* Vol. 8 No. 7 (173 – 182)
21. Sudarmono, Sulehan, J. Noor Rahamah Hj. Abu Bakar. (2012). Dinamika patronase dalam masyarakat nelayan: Artikulasi ragam pengeluaran perikanan berskala kecil di Kelurahan Cambayya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. *GEOGRAFIA. Journal of Society and Space* Vol. 8 No. 8 (65 – 75)
22. Sudarmono. (2014). *Underdevelopent of coastal fishermen in Kota Makassar*. Ph.D thesis. Universiti Kebangsaan Malaysia

23. Sutherland, H. Teripang dan Perahu Wangkang Perdagangan Makassar dengan China pada Abad ke-18 (kl. 1720-an – 1840-an). Dlm. Roger Tol et al (editor). 2009. *Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan*. Jakarta: KITLV
24. Suwarsono & So, A. Y. (2000). *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
25. Tain, A. (2010). *Analisis kemiskinan dan adaptasi rumah tangga nelayan motor tempel di wilayah tangkap lebih Jawa Timur*. Disertasi Doktor. Universitas Padjadjaran. Bandung
26. Yusran, M. (2002). *Ponggawa-Sawi Relationship in Co-Management: An Interdisciplinary Analysis of Coastal Resource Management in South Sulawesi, Indonesia*. Ph.D thesis. Faculty of Graduate Studies. Dalhousie University. Canada.

---

<sup>i</sup> Artikel ini menghindari penggunaan istilah sawi. Dalam beberapa catatan akademik mengenai patron klien di Sulawesi Selatan, posisi buruh lebih dikenal sebagai istilah *sawi*. Namun, dinamika yang berkembang saat ini mengarah kepada keadaan yang membiaskan asumsi terdahulu. Umumnya, seringkali didapatkan orang-orang yang menjalankan fungsi sebagai *sawi*, namun mereka enggan disebut sebagai sawi. Hal ini berkaitan erat dengan pandangan dan konotasi yang kurang bagus dan terkesan merendahkan terhadap figure seorang sawi. Oleh karena pergeseran makna yang cukup signifikan sehingga dikawatirkan akan menghasilkan bias atas makna yang sesungguhnya sebagaimana yang terdapat di lapangan, maka istilah *sawi* tidak digunakan.